



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

Banjarmasin, **2 Januari 2018**

Kepada

Nomor : 120.04/ **0003** /Pem
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyusunan LKPJ dan LPPD Gubernur
Akhir Tahun Anggaran 2017

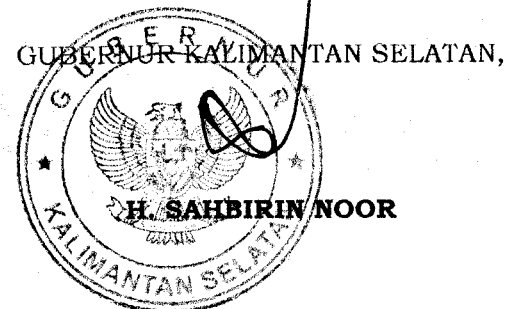
Yth. Seluruh Kepala SKPD
Lingkup Pemprov. Kalsel

di -
Tempat

Dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2017 Provinsi Kalsel, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD, serta menginformasikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Memperhatikan Surat Edaran Mendagri Nomor 120.04/10695/OTDA Tanggal 12 Desember 2017 Hal Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017, Penyusunan LPPD Tahun 2017 masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta perhatian Saudara sebagai berikut :
 - a. Seluruh SKPD Lingkup Pemprov Kalsel agar menyiapkan bahan laporan (LKPJ dan LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2017 sesuai sistematika/format laporan terlampir;
 - b. SKPD yang memiliki/membawahi UPTD, agar membuat laporan kegiatan masing-masing UPTD dalam satu kesatuan laporan LKPJ dan LPPD;
 - c. Bahan Laporan LKPJ dan LPPD Akhir Tahun Anggaran 2017 dibuat dalam bentuk tertulis (hardcopy) dan file (softcopy dalam bentuk CD) selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Kalsel cq. Kepala Biro Pemerintahan ditandatangani Kepala SKPD, untuk file (softcopy) laporan juga dikirim melalui email : biropem.monev@gmail.com **selambatnya tanggal 15 Januari 2017;**
 - d. Hal-hal lain yang perlu penjelasan lebih lanjut, dapat dikoordinasikan melalui Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan HP.08125009189 (Sdr.Fahri Riza, S.Hut) atau HP.085251722449 (Sdr. Rahmat Maidiyanto).

Demikian untuk menjadi perhatian bersama, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



**SISTEMATIKA LAPORAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
SEBAGAI BAHAN PENYUSUNAN LKPJ DAN LPPD PROVINSI KALSEL
(Format Gabungan dalam Satu Laporan SKPD)**

- I. **URUSAN DESENTRALISASI** (*urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD*)
- a. Program dan Kegiatan
Memuat nama program dan kegiatan SKPD yang dilaksanakan pada TA. 2017 bersumber dari Dana APBD.
 - b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Dalam hal SKPD ada melaksanakan SPM, apabila tidak ada SPM cukup dijelaskan pada subbab realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.
 - c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Menjelaskan realisasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD, apa target/sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017 dan bagaimana output dan hasil program/kegiatan pada akhir tahun 2017.
 - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib/ Pilihan
Memuat nama SKPD dan UPTD serta urusan pemerintahan yang dilaksanakan.
 - e. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional,
Memuat Jumlah Pegawai pada SKPD dan UPTD berdasarkan pendidikan, pangkat dan golongan serta jumlah jabatan struktural dan fungsional yang ada pada SKPD dan UPTD.
 - f. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Memuat data alokasi dan realisasi serapan Anggaran SKPD s/d Desember 2017.
 - g. Proses Perencanaan Pembangunan
Menjelaskan secara singkat tahapan yang dilaksanakan dalam perencanaan program dan kegiatan pada SKPD.
 - h. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
Menjelaskan kondisi sarana dan prasarana secara umum yang digunakan dalam melaksanakan program kegiatan pada SKPD.
 - i. Permasalahan dan solusi
Menjelaskan hal-hal yang menghambat pelaksanaan program/kegiatan sehingga tidak/belum tercapainya target sebagaimana yang diharapkan serta bagaimana solusi/upaya mengatasinya kedepan.
 - j. Prestasi / Penghargaan yang diraih
Jika ada prestasi/ penghargaan dari Pemerintah Pusat yang diterima Pemprov. Kalsel diraih dalam pelaksanaan program/ kegiatan SKPD pada tahun 2017 (lampirkan fotocopy plagam penghargaannya)
 - k. Hal-hal lain yang dianggap perlu dilaporkan
- II. **TUGAS PEMBANTUAN** (*dibuat apabila SKPD melaksanakan Tugas Pembantuan dari APBN*)
- A. Tugas Pembantuan Yang Diterima
 1. Dasar Hukum
 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 3. Program dan Kegiatan
 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan
 5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
 6. SKPD/UPTD yang Melaksanakan Tugas Pembantuan
 7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
 8. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (Lengkap, Kurang, Mencukupi atau lainnya)
 9. Permasalahan dan solusi
 10. Hal-hal lain yang dianggap perlu dilaporkan
 - B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan
 1. Dasar Hukum
 2. Urusan Yang Ditugaspembantuan kepada Kabupaten/ Kota dan Desa
 3. Sumber dan Jumlah Anggaran.
 4. Sarana dan Prasarana
 5. Permasalahan dan solusi
- III. **TUGAS UMUM PEMERINTAHAN** (*dibuat bila ada program / kegiatannya pada SKPD*)
- A. Kerjasama Antar Daerah
 1. Daerah Yang Diajak Kerjasama
 2. Dasar hukum
 3. Bidang kerjasama
 4. Nama kegiatan
 5. SKPD/UPTD Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah
 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Goiongan
 7. Sumber dan Jumlah Anggaran
 8. Jangka Waktu Kerjasama
 9. Hasil (Output) Dari Kerjasama
 10. Permasalahan dan Solusi
 11. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1. Mitra Yang Diajak Kerjasama
2. Dasar hukum
3. Bidang kerjasama
4. Nama kegiatan
5. SKPD/UPTD Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
7. Sumber dan Jumlah Anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil (Output) Dari Kerjasama
10. Permasalahan dan Solusi
11. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

1. Forum Koordinasi
2. Materi Koordinasi
3. Instansi Vertikal Yang Terlibat
4. Sumber dan Jumlah Anggaran
5. SKPD/UPTD Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
7. Sumber Kegiatan Koordinasi Yang Dilaksanakan
8. Hasil dan Manfaat Koordinasi
9. Tindak Lanjut Koordinasi
10. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

D. Pembinaan Batas Wilayah

1. Sengketa Batas Wilayah (apabila ada)
2. Solusi yang dilakukan dan tingkat penyelesaian (selesai, belum selesai atau perlu tindak lanjut)
3. SKPD Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status bencana
3. Sumber dan jumlah anggaran
4. Antisipasi Daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana
5. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
6. Kelembagaan yang khusus dibentuk menangani bencana
7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

1. Jenis Kawasan Khusus
2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus (pusat, daerah, BUMN, Swasta dan atau kerjasama) dan Dasar Hukum Penetapannya
3. Sumber Anggaran
4. Permasalahan dan solusi
5. SKPD yang menangani
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Gangguan yang terjadi (/konflik/SARA/anarkisme/separatisme)
2. SKPD yang menangani
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
4. Penanggulangan dan kendalanya
5. Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan
6. Sumber dan jumlah anggaran

IV. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) LPPD TH.2017

▪ Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD terdiri dari :

1. Lampiran I.1 : Tataran Pengambil Kebijakan (Isian IKK merupakan data dari beberapa SKPD)
2. Lampiran I.2 : Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum (Isian IKK merupakan data dari **seluruh SKPD**)
3. Lampiran I.3 : Tataran Pelaksanaan Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib Dan Urusan Pilihan (Isian IKK merupakan data dari beberapa SKPD)

▪ Isian IKK LPPD disampaikan bersamaan dengan penyampaian LPPD.

CATATAN :

Format file laporan dan lampiran IKK LPPD dapat diunduh melalui situs biropem.kalselprov.go.id